

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Soroti Pembangunan Jalan Banjarbaru – Tanah Bumbu dan Jembatan Kotabaru Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/388557/fraksi-pks-soroti-pembangunan-jalan-banjarbaru-tanbu-dan-jembatan-kotabaru-kalsel>

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti pembangunan jalan antara Banjarbaru - Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu atau Tanbu dan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru - kabupaten paling timur provinsinya. Ketua Fraksi PKS H Ardiansyah mengemukakan itu sebelum rapat paripurna internal DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu sehubungan dengan aspirasi yang berkembang selama ini.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalsel itu menyarankan, ada ekspose perkembangan pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin serta Jembatan Pulau Laut atau yang menghubungkan ibukota Kabupaten Kotabaru dengan daratan Kalimantan.

Ardiansyah - anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan serta lingkungan hidup itu berharap, perencanaan pembangunan Jembatan Kotabaru lebih matang.

Begitu pula Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Pasalnya, lanjut wakil rakyat kelahiran 'Kota Dodol' Kandangan

(135 km utara Banjarmasin) ibukota HSS itu, perencanaan pembangunan Jembatan Kotabaru sudah lebih kurang sepuluh tahun lalu.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu mengingatkan, perlu kehati-hatian dan kecermatan agar pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut dapat terlaksana dengan baik serta berdampak positif. “Memang kawan-kawan di Komisi III terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan Jembatan Kotabaru yang sejak lama menjadi dambaan terwujud,” tambah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut.

Sebagai catatan, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah mengeluarkan anggaran lebih Rp100 miliar pada masa Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin.

Berdasarkan perencanaan semula anggaran pembangunan Jembatan Kotabaru lebih kurang Rp3 triliun dengan sistem patungan Pemprov Kalsel Rp500 miliar, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp2 triliun atau untuk bentang Jembatan tersebut mengharapkan bantuan pemerintah pusat. Namun seiring perkembangan harga bahan bangunan dan lainnya perkiraan anggaran Rp3 triliun tidak mencukupi, sehingga memerlukan perhitungan ulang.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/388557/fraksi-pks-soroti-pembangunan-jalan-banjarbaru-tanbu-dan-jembatan-kotabaru-kalsel>, 27 September 2023.
2. <https://poroskalimantan.com/pembangunan-jalan-bypass-banjarbaru-batulicin-masih-perlu-rp700-miliar/>, 19 Juni 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.